

PROSEDUR PENCAIRAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG SINGARAJA

LUH KETUT ASRI RAHAYU

Program Studi Akuntansi Program Diploma III,
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
Email : luhketutasriahayu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pencairan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Subjek penelitian adalah pimpinan beserta karyawan. Adapun obyek penelitian ini adalah prosedur pencairan kredit KUR(kredit usaha rakyat) pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan prosedur pencairan kredit KUR (kredit usaha rakyat) dimulai dari pengajuan permohonan kredit,penyelidikan berkas, penilaian kelayakan usaha, wawancara pertama, penilaian ke lokasi, wawancara ke dua, keputusan kredit, berkas di bawa ke bagian HAK, penandatanganan akad kredit, teller. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencairan kredit adalah *fotocopy* KK, *fotocopy* surat kepemilikan jaminan, formulir permohonan kredit,surat pertanyaan kepemilikan barang dan jaminan, surat perjanjian kredit, surat kuasa menjual, kartu pinjaman,kartu angsuran pinjaman,bukti pengeluaran umum,kwitansi penerimaan pinjaman. Bagian kredit yang berperan yaitu, bagian kredit, bagian HAK (hukum dan administrasi kredit) dan teller.

Kata-kata kunci : Prosedur, Kredit, Bank.

ABSTRACT

This study aims to determine the credit disbursement process at PT. Bali Regional Development Bank Singaraja Branch. The subject of this research is the leadership and employees of PT. Bali Regional Development Bank Singaraja Branch. The object of this research is the procedure for KUR credit disbursement (people's business credit) at the Bali Regional Development Bank, Singaraja Branch. Data collection methods used were interviews and documentation. While the technical data analysis used is descriptive qualitative analysis.

The results of the study show that the procedure for KUR credit disbursement (people's business credit) starts from the submission of credit applications, file investigations, business feasibility assessments, first interviews, location assessments, second interview, credit decisions, files taken to the HAK section, signing of credit agreements , teller. The documents used in the procedure for credit disbursement are requirements documents (photocopy of KK, a copy of the guarantee ownership certificate and the conditions needed in the credit application, credit application form, letter of goods ownership and collateral, credit agreement letter, power of attorney to sell, card loans, loan installment cards, proof of general expenditure, receipt of loan receipts. The parts of credit that play a role in disbursing credit, namely, the credit section, the portion of HAK (legal and credit administration) and tellers.

Keywords: Procedur, Credit, Bank.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini mengalami perubahan dilihat dari perekonomian yang terus meningkat dari sebelumnya. Salah satu faktor yang mendorong perekonomian di Indonesia saat ini adalah sektor perbankan. Perbankan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut ke masyarakat. Dana yang disalurkan ke masyarakat tentu saja membantu masyarakat dalam menambah modal dalam usahanya.

Pencairan kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Sering kali ditemui dilapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian perjanjian kredit ini perlu mendapatkan pemahaman khusus dari kedua belah pihak karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pencairan kredit.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan. Pencairan kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Menurut Kasmir, (2011:25) "Kredit usaha rakyat adalah modal kerja atau investasi pada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable dengan plafond kredit sampai dengan Rp 500,000.000 (total *ekspour*) dan jaminan oleh perusahaan penjamin". Kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Undang-undang Nomer 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa "kredit adalah penyediaan uang atau tangihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga". Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomer 10 tahun 1998 perbankan menyebutkan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya. Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang dan meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam bidang perkreditan.

Jaminan merupakan unsur yang sangat penting dan mempunyai peranan dalam penentuan analisis kredit. Dalam undang-undang perbankan yang dimaksud dengan pemberian jaminan kredit adalah "keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya". Agunan (*collateral*) merupakan salah satu unsur dari jaminan. Agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih dari proyek yang di biayainya tersebut. Dengan demikian agunan tambahan (diluar proyek atau barang yang dibiayai) tidak mutlak harus disediakan oleh debitur.

Perjanjian kredit yang berlangsung antara pemberi kredit dengan penerima kredit disamping hak dan kewajiban yang timbul maka harus ada kesepakatan tertulis yang di jadikan dasar sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum antara keduanya. Pencairan kredit ditemukan permasalahan-permasalahan dalam proses pencairan kredit seperti : banyaknya nasabah pada awal bulan, berkas-berkas nasabah yang belum turun dari bagian kredit. Pencairan kredit melalui tahap-tahap yang tidak sedikit diantaranya debitur mengisi permulir permohonan kredit, dilakukan wawancara kepada debitur, harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada. Debitur memberikan jaminan atas kredit yang akan diberikan.

Berdasarkan latar belakang dan atas pemikiran diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul sebagai berikut : "Prosedur Pencairan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja".

2. Metode Penelitian

Rancangan penelitian memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan saat penelitian. Rancangan penelitian harus dibuat dengan sistematis dan logis sehingga

dapat dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 30 Singaraja. Penelitian ini diawali dengan melakukan pengamatan (observasi awal). Dari hasil observasi, dirumuskan sebuah permasalahan mengenai bagaimana prosedur pencairan kredit usaha rakyat pada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja. Untuk memecahkan masalah tersebut maka dilakukan pengkajian teori dan pengumpulan data. Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara melakukan wawancara, dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian, seperti pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pencairan kredit usaha rakyat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja, kemudian melihat dokumen yang digunakan, dan bagaimana prosedur yang digunakan. Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari catatan atau dokumen dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja yang berkaitan dengan prosedur pencairan kredit usaha rakyat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Dari data tersebut, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang nantinya dapat diperoleh kesimpulan mengenai prosedur pencairan kredit usaha rakyat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja.

3. Hasil Dan Pembahasan

Dokumen yang digunakan untuk pencairan kredit usaha rakyat pada PT. BANK Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja sebagai berikut : 1). Dokumen syarat, Dokumen ini mencakup surat pengantar kepala desa, fotocopy KTP yang masih berlaku, fotocopy KK, fotocopy surat kepemilikan jaminan dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam permohonan jaminan . 2). Formulir permohonan kredit, Formulir ini disediakan oleh bank untuk diisi calon nasabah. Formulir ini berisi tentang identitas calon debitur secara lengkap, jumlah pinjaman, keterangan usaha, dan jenis agunan yang dijamin untuk memperoleh pinjaman kredit dan dilampirkan dokumen syarat. 3). Surat pertanyaan kepemilikan barang jaminan, Berisi pengakuan atau pertanyaan calon nasabah dan kerelaan melepas hak yang dijamin untuk menjual. 4). Surat perjanjian kredit, Surat ini dibuat oleh bagian hukum dan administrasi kredit yang berisi hal-hal yang mengikat nasabah untuk melunasi kewajiban pada jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 5). Surat kuasa menjual, Surat berisi tentang kekuasaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank untuk menjual agunan yang dijamin apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban. Apabila penjualan yang diperoleh melebihi jumlah kreditnya maka kelebihan akan dikembalikan ke pemiliknya. 6). Kartu pinjaman, Kartu ini digunakan untuk memantau kolektibilitas debitur dalam membayar angsurannya. 7). Kartu angsuran pinjaman, Kartu ini digunakan untuk mencatat jumlah angsuran yang dibayar oleh debitur termasuk tanggal pembayaran jumlah bunga. 8). Bukti pengeluaran umum, Surat ini dibuat oleh kasir untuk mencatat sejumlah pembayaran. 9). Kwitansi penerimaan pinjaman, Surat ini digunakan sebagai bukti bahwa nasabah telah menerima sejumlah uang dari bank.

Bagian pencairan kredit yang berperan dalam mencairkan kredit yaitu : Bagian kredit mempunyai tugas-tugas yaitu : 1). Membuat rencana kerja dan anggaran kegiatan pemasaran sesuai dengan pedoman Kantor Pusat. 2). Memeriksa aplikasi permohonan Kredit. 3). Membantu unit pengelola nasabah kredit dalam memantau perkembangan usaha nasabah. 4). Mendukung Kepala Cabang dalam hal membina dan meningkatkan kinerja bisnis perkreditan. 5). Bertanggung jawab secara penuh di dalam meningkatkan kuantitas dan kuantitas perkreditan. 6). Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap aktivitas pemasaran kredit. 7). Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pemasaran atau penjualan bisnis perkreditan secara proaktif kepada nasabah atau calon nasabah. 8). Bertanggung jawab terhadap aktivitas pengelolaan permohonan kredit yang diajukan. 9). Bertanggung jawab terhadap proses atau aktivitas-aktivitas pemantauan dan pengendalian kinerja serta kolektibilitas perkreditan atau pembayaran nasabah secara dini dan proaktif. 10). Bertanggung jawab di dalam membantu kelancaran proses pengadministrasian atau dokumentasi kredit yang dilakukan oleh unit administrasi kredit.

11). Bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan perkreditan kepada nasabah yang telah memertahankan kepentingan Bank di atasnya.

Bagian HAK (Hukum dan Administrasi Kredit) mempunyai tugas-tugas yaitu:

- 1). Membuat perjanjian kredit dan pengikatan barang guna secara notarial.
- 2). Membuat, memantau serta memelihara file pengkreditan.
- 3). Menerima permohonan/aplikasi permohonan jaminan Bank.
- 4). Memberi dukungan kepada bidang pelayanan dalam mencapai dan mengendalikan visi, misi, strategi, rencana kerja, dan anggaran kantor cabang, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai.
- 5). Mendukung Wakil Kepala Cabang dalam membina dan meningkatkan kinerja portofolio perkreditan. Bertanggung jawab secara penuh di dalam meningkatkan kualitas sistem dan prosedur administrasi kredit.
- 6). Membantu mengarahkan, mengendalikan dan menilai staff pelaksana yang ada dibawahnya untuk memantau dan memastikan bahwa penyempurnaan atas hasil pemeriksaan audit telah dilakukan sesuai dengan saran yang diberikan oleh auditor.
- 7). Membantu kelancaran pelaksana aktivitas pengelola kredit kolektibilitas I dan II yang direstrukturisasi.
- 8). Bertanggung jawab terhadap penyediaan pengelolaan administrasi perkreditan.
- 9). Bertanggung jawab terhadap proses pembuatan laporan pengelolaan pengadministrasian perkreditan cabang, laporan debitur bermasalah, debitur macet dan sebagainya.
- 10). Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengelolaan portepel kredit

Bagian teller mempunyai tugas-tugas Tugas teller dalam pencairan kredit yaitu mencairkan dana atau sejumlah kredit nasabah dan mengesahkan bukti penerimaan bahwa dana kredit telah diterima oleh nasabah.

Prosedur Pencairan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Pencairan kredit dimulai dari Pengajuan permohonan kredit. Permohonan kredit dimulai dengan datangnya calon nasabah ke bank yang diterima oleh bagian pelayanan kredit, seksi pelayanan kredit menerima permohonan kredit dari calon nasabah, calon nasabah mengisi formulir permohonan kredit, seksi pelayanan kredit menerima formulir permohonan kredit yang telah diisi oleh calon nasabah. Kemudian penyelidikan berkas pinjaman untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan perlengkapan dan sudah benar termasuk penyelidikan keabsahan berkas. Setelah penyelidikan berkas pinjaman selanjutnya penilaian kelayakan kredit atau usaha dalam penilaian kelayakan kredit ini perlu memperhatikan beberapa aspek diantaranya aspek hukum, pasar dan pemasaran, keuangan, teknis, manajemen dan ekonomi sosial. Kemudian wawancara pertama hal ini dilakukan mendapatkan keyakinan bahwa berkas-berkas tersebut sesuai dengan yang diinginkan pihak bank. Setelah wawancara pertama yang dilakukan oleh bagian kredit selanjutnya peninjauan ke lokasi tujuannya untuk memastikan bahwa objek yang akan di biayai benar-benar ada sesuai dengan yang tertulis di permohonan kredit. Selanjutnya wawancara II merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada saat setelah dilakukan dilapangan. Setelah wawancara kedua akan dilakukan pengambil keputusan kredit, keputusan kredit merupakan untuk menentukan bahwa kredit tersebut layak atau tidak untuk diberikan. Setelah itu Berkas-berkas yang sudah disetujui oleh pihak bagian kredit dan kepala bagian cabang akan dibawa ke bagian HAK (seksi hukum dan administrasi kredit) selanjutnya di bagian HAK akan di buat perjanjian kredit dan melengkapi berkas-berkas yang lainnya. Setelah berkas-berkas ada di bagian hukum dan administrasi kredit akan dilakukan penandatanganan akad kredit merupakan kredit yang belum dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah akan menandatangani akad kredit. Selanjutnya Setelah akad kredit ditandatangani selanjutnya kredit akan di cairkan melalui teller bank.

Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pencairan kredit di antaranya : (1) kreditur tidak mematuhi perjanjian yang telah di buat oleh pihak bank; (2) Kreditur tidak menyerahkan atau membayar jangka waktu yang di tentukan; (3) Kreditur tidak berbuat sesuai yang dijanjikan dalam tenggang waktu yang di tentukan. (4) Kreditur tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang di tentukan. Adapun penyelesaian dalam permasalahan di atas di antaranya : (1) Suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan

debitur ; (2) Apabila kreditur tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh pihak bank maka permasalahan ini di bawa ke jalur hukum.

Efektifitas Prosedur Pencairan Kredit pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Suatu prosedur dikatakan efektif jika suatu target (kualitas, kuantitas dan waktu) dapat tercapai. Pencairan Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja peneliti melakukan wawancara kepada kepala seksi bagian HAK (Hukum dan administrasi kredit). Berdasarkan wawancara kepada kepala seksi bagian HAK (hukum dan administras kredit) diketahui bahwa prosedur pencairan kredit yang dilakukan di bagian HAK Sudah efektif karena target yang ditentukan oleh bank sudah tercapai atau terpenuhi seperti : Prosedur pencairan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang singaraja dikatakan efektif dilihat dari banyaknya nasabah yang mengajukan kredit dengan banyaknya pengajuan kredit oleh nasabah maka karyawan bank akan bekerja keras agar target yang di rencanakan oleh bank bisa di capai apabila target tercapai maka akan meningkatkan laba bank. Pencairan kredit yang dilakukan oleh bagian HAK (Hukum dan administrasi kredit) sudah efektif karena para karyawan-karyawan di bagian hukum dan administrasi kredit dalam satu harinya sudah menyelesaikan tugas dalam mencairkan kredit kepada nasabah sampai selesai. Namun didalam pencairan kredit yang dilakukan dapat dikatakan tidak efektif karena terjadi tertundanya pencairan kredit yang disebabkan oleh nasabah yang melupakan buku tabungan yang menyebabkan pihak hukum dan administrasi kredit (HAK) tidak bisa mencairkan dana nasabah.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur pencairan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada PT Bank Pembangunan Daerah bali cabang singaraja yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Prosedur Pencairan Kredit Usaha Rakyat pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Apabila nasabah akan mencari kredit akan melalui proses dimulai dari pengajuan permohonan kedit, penyelidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan kredit,wawancara pertama, peninjauan ke lokasi, wawancara kedua ,keputusan kredit, berkas akan dibawa ke bagaian hukum dan administrasi kredit, penandatanganan akad kredit dan yang terakhir akan dicairkan melalui teller.

Nasabah yang mencari kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang singaraja akan mengumpulkan berkas-berkas seperti :surat pengantar kepala desa, fotocopy KTP yang masih berlaku, fotocopy KK, fotocopy surat kepemilikan jaminan dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam permohonan jaminan. Apabila syarat-syarat telah di penuhi oleh nasabah maka pencairan kredit akan lebih mudah dalam mencirikan kredit nasabah

DAFTAR RUJUKAN

- Baridwan, Z. 1991 *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE
Baridwan, Z. 2000. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta :BPFE
- Cermati,2015. Artikel fungsi bank dan mengenal kegiatan-kegiatan operasionalnya.
- Fitriya,2018. Artikel pengertian bank, jenis-jenis dan fungsinya
<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-bank-jenis-dan-fungsinya-untuk-masyarakat>
- Hidayati,Gatot.2012. "Sistem Penghimpunan dan Penyaluran Dana masyarakat".
Jurnal Akuntansi dan Keuangan.Volume 3, No.1.
- <https://bukharawrite.wordpress.com/2014/08/16/sumber-sumber-dan-bank>
- Ismail.2010.*Akuntansi Bank*. Jakarta:Kencana
- Kasmir. 2011. *Manajemen perbankan*.Jakarta : PT Raja Grafindo
- Mulyadi.2001.Sistem akuntansi.Yogyakarta:STIE YKPN

- Purnamawati,Ayu, Adi Yuniarta dan Erni Sulindawati.2014.*Akuntansi Perbankan*.Yogyakarta: Graha ilmu
- Puspitawati,lilis, Anggadini,dewi.2011.*Sistem informasi akuntansi*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Superno,Wangsit.2017. “ Analisis Kinerja Penghimpunan Dana dalam meningkatkan penyaluran kredit”. Jurnal moneter. Volume IV, No 2.
- Susilo Dahlan. 2000.*Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta : PT.Salemba Empat
- Sutihat Rahayu,2014. Sumber-Sumber dana bank
- Undang-undang No. 10.(1998). Tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992,2013. jurnal pengertian bank
<https://www.ejurnal.com/2013/11/pengertian-bank.html>